



KLIPING KORAN

Sumber : Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Surabaya Pos, Surya, Malang Post, Bhirawa, Suara Indonesia, Koran Pendidikan, Majalah Tempo, Majalah GATRA, Jawa Pos/Radar Malang, Seputar Indonesia, Pena Pendidikan ...

Tahun : 2016
Bulan : JAN, FEB, MAR, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOV, DES
Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 hal

Kampus UIN dan UM Larang Perpeloncoan

MALANG KOTA - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan Universitas Negeri Malang (UM) memastikan tidak ada perpeloncoan kepada mahasiswa baru. Program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB) yang segera dimulai, akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif yang menunjang proses perkuliahan.

Rektor UIN Maliki Malang Prof Dr Mudjia Rahardjo MSi mengatakan, sudah ada sosialisasi kepada panitia terkait larangan adanya kekerasan dalam PKKMB. Jika masih ada yang melanggar, Mudjia siap memberikan sanksi tegas kepada pelakunya. "Sanksi kami lihat dari jenis pelanggaran dulunya. Tapi bisa saya pastikan tidak akan ada perpeloncoan," ujarnya, Selasa (26/7).

Sementara itu, hal yang sama

dilakukan Universitas Negeri Malang (UM). Kabag Akademik UM RC Herry Soewito memastikan tidak ada model perpeloncoan dalam bentuk apapun di lingkungan UM. Sebab, proses PKKMB akan terpusat di dalam ruangan. "Lebih ke materi dalam kelas. Tidak ada lagi kegiatan luar ruangan," jelasnya.

Materi yang diberikan juga beragam. Mulai dari informasi keuniversitasan, pembelajaran di perguruan tinggi, hingga amanat kebangsaan akan disuguhkan kepada para mahasiswa baru (maba) UM. "Sudah tidak zaman lagi maba digunduli atau disuruh push up," papar Herry. Atribut yang digunakan juga tidak neko-neko. Cukup jas dan topi almamater kampus.

Panitia yang diterjunkan oleh UM berasal dari kemahasiswaan,

pihak rektorat bertindak sebagai pengawas. Walaupun masih melibatkan mahasiswa, namun UM membatasi hanya sebatas jalur koordinasi. "Materi semua yang memberikan dosen atau pejabat kampus," terang Herry.

Selain itu, sudah ada sosialisasi terkait larangan tindak kekerasan fisik dan psikologis. Jika masih ditemui ada pelanggaran, Herry mengatakan, akan ada sanksi tegas dari pihak universitas. Ragam sanksi yang diberikan pun tergantung dari kesalahan yang dilakukan. (zya/c1/lid)